

**PROSEDUR PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT  
PADA BANK NAGARI CABANG PULAU PUNJUNG KABUPATEN  
DHARMASRAYA**

*Prisca Ayesha<sup>1</sup> Indria Ukrita<sup>2</sup>*

**ABSTRAC**

*The provision of KUR or credit by banks aims to improve the economic growth of Indonesia through Micro Small Medium Enterprises. In order to be given credit smoothly then Bank Nagari Branch Pulau Punjung must be selective in giving credit to debtor. A sound and correct crediting procedure is the bank's effort to reduce the risk of lending. Writing This Final Project aims to identify the KUR conducted by Bank Nagari Branch Pulau Punjung, to know the procedure of giving KUR conducted, and to find out the problems contained in the procedure of channeling KUR conducted Bank Nagari PulauPunjung. Student Work Experience Activities are held for 2.5 months. The scope of this final task is the type of KUR, KUR distribution procedures and problems contained in KUR distribution procedures. From the results of the discussion can be identified that Bank Nagari Branch Pulau Punjung applying micro KUR and retail KUR which in the procedure have criteria of prospective borrowers as well as documents requirements. Problems that occur in this KUR distribution procedures include the applicant's identity on credit, Business License, additional guarantee, attitude of credit applicants, and the relationship of credit applicants with other banks.*

*Keywords: procedure, distribution, KUR*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Agribisnis BP 1401361002 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh

<sup>2</sup> Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu pula, dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala bidang, maka dunia perbankan dituntut untuk lebih meningkatkan peranannya, baik dalam mobilisasi tabungan masyarakat maupun penyaluran dana untuk pembiayaan investasi. Hal ini disebabkan oleh kegiatan pembangunan yang terus meningkat yang memang memerlukan dana yang semakin besar. Tantangan dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya semakin besar, untuk itu Pemerintah bersama-sama lembaga perbankan terus memantapkan diri untuk menjawab tantangan tersebut.

Berbagai langkah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah guna meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi Indonesia yakni melalui penggalangan dan pergerakan berbagai macam potensi usaha. Dalam hal ini, peranan perbankan dalam pembangunan ekonomi Indonesia dituntut agar lebih aktif dan efektif untuk mendorong investasi, mendorong kewirausahaan dalam berbagai macam komoditi usaha. Peranan yang diharapkan dari perbankan nasional berpengaruh kepada dunia perbankan yang memiliki fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Adanya peranan yang demikian membawa konsekuensi bawa perbankan nasional dituntut untuk selalu dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya guna tercipta stabilitas nasional yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Untuk lebih meningkatkan peranan perbankan dalam pembangunan di Indonesia, maka pemerintah dalam hal ini

mengeluarkan kebijaksanaan terhadap dunia perbankan, salah satunya yaitu pelaksanaan pemberian kredit.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan ataupun kesepakatan pinjam - meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu yang ditentukan. Kewajiban itu dapat berupa pokok pinjaman, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Kredit selain mempunyai fungsi dalam membantu masyarakat, juga merupakan jantung dan urat nadi sebuah bank, tulang punggung bagi kehidupan usaha bank tersebut, karena pendapatan terbesar dari sebuah bank diperoleh dari jasa kredit itu sendiri.

Pada pelaksanaan KUR, supaya kredit yang diberikan tersebut lancar maka pihak Bank Nagari Cabang Pulau Punjung harus selektif dalam memberikan kredit pada debitur, prosedur pemberian kredit yang sehat dan benar adalah upaya bank dalam mengurangi risiko dalam pemberian kredit, yang dimulai dengan tahapan analisis pemberian kredit yang meliputi beberapa tahap sehingga mengeluarkan keputusan kredit yang didasarkan pada hasil analisa yang dilakukan, dimana sebelum kredit di berikan maka pihak Bank Nagari Cabang Pulau Punjung harus menganalisa pemberian kredit untuk menentukan kesanggupan kreditur membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman. Oleh sebab itu Bank Nagari Cabang Pulau Punjung harus bisa menetapkan prosedur pelaksanaan kredit serta mengantisipasi masalah-masalah yang timbul, karena itu akan berpengaruh pada aktivitas perbankan itu sendiri terutama terhadap kerja operasional Bank Nagari Cabang Pulau Punjung dalam penyaluran kredit untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan KUR dengan beberapa kebijakan pendukungnya, maka

diharapkan penyaluran KUR oleh Bank Nagari Cabang Pulau Punjung dapat berjalan dengan baik dan didukung serta dilaksanakan sepenuhnya oleh setiap pelaksana/pejabat perkreditan sehingga penyaluran KUR tersebut dapat direalisasikan sebagaimana yang diharapkan. Dari uraian di atas penulis mengangkat topik dengan judul “**Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Nagari Cabang Pulau Punjung**”.

### **1.2. Tujuan**

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh Bank Nagari Cabang Pulau Punjung
2. Untuk mengetahui prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh Bank Nagari Cabang Pulau Punjung.
3. Untuk mengetahui permasalahan yang terdapat pada prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilaksanakan Bank Nagari Pulau Punjung.

## **II. METODE PELAKSANAAN**

### **2.1. Waktu dan tempat**

Kegiatan Pengalaman Kerja Praktek Mahasiswa (PKPM) dilaksanakan selama 2,5 bulan (10 minggu) dimulai dari tanggal 06 Maret-12 Mei 2017 yang bertempat di Bank Nagari Cabang Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

### **2.2. Ruang lingkup**

Berdasarkan judul penulis dapat merumuskan ruang lingkup yang dibahas dan diuraikan dalam tugas akhir ini yaitu jenis KUR (Kredit Usaha Rakyat), prosedur penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) serta permasalahan yang terdapat pada prosedur penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada Bank Nagari Cabang Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

### **2.3. Data dan sumber data**

Data yang dibutuhkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pelaksanaan kegiatan dilapangan, diskusi, dan dokumentasi foto sebagai pelengkap data primer. Data primer yang diperoleh meliputi gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan sumber daya manusia perusahaan. Selain itu, juga diperoleh data tentang penerapan prosedur Kredit Usaha Rakyat Bank Nagari Cabang Pulau Punjung, diantaranya jenis KUR yang disalurkan, kriteria calon debitur KUR, dan dokumen persyaratan permohonan KUR.

Sedangkan data sekunder bersumber dari literatur yang didapat dari buku-buku penunjang, dan data-data dari internet yang berhubungan dengan judul laporan serta data perusahaan yang sudah ada. Data sekunder yang diperoleh dari literatur meliputi pengertian dan fungsi bank, tinjauan umum tentang kredit, pengertian prosedur, pengertian dan pelaksanaan KUR, serta prosedur penyaluran KUR secara umum.

### **2.4. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Metode observasi**

Metode observasi adalah melengkapi dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek-objek penelitian yang sesuai dengan topik penelitian. Dalam hal ini observasi dilakukan secara langsung, melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diamati (Arikunto, 2006). Dalam metode ini penulis membuat catatan kecil, mengamati dilapangan yang bisa berkaitan dengan Kredit Usaha Rakyat Miko.

## **b. Metode Wawancara**

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dimana percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2005). Dalam metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana wawancara dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar kepada pemimpin seksi kredit dan karyawan/ti mengenai gambaran umum perusahaan dan mengenai pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Nagari Cabang Pulau Punjung.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Gambaran Umum Bank Nagari Cabang Pulau Punjung**

#### **3.1.1. Sejarah Berdirinya Bank Nagari Cabang Pulau Punjung**

Bank Nagari Cabang Pulau Punjung yang dulunya merupakan salah satu cabang pembantu dari cabang Bank Nagari Koto Baru. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan perkembangan perekonomian pada tanggal 20 agustus 2010 Bank Nagari cabang pembantu Pulau Punjung berubah status menjadi cabang Pulau Punjung.

Kantor Bank Nagari Cabang Pulau Punjung terletak didaerah yang sangat strategis. Dimana lokasi Bank Nagari Pulau Punjung berbatasan langsung dengan dua Provinsi tetangga yaitu Provinsi Jambi (Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo) dan Provinsi Riau (Kabupaten Kuantan Senggigi). Ditambah lagi pembangunan dan perkembangan perkebunan karet serta komoditi kelapa sawit sangat pesat. sehingga pemerintah daerah Sumatera

Barat mengambil kebijakan untuk mengembangkan daerah ini menjadi kabupaten yang dulunya hanya ada empat Kecamatan dan sekarang berkembang menjadi sebelas Kecamatan.

Bank Nagari Pulau Punjung terletak di Jalan Lintas Sumatera Km 2 Kabupaten Dharmasraya. Pulau Punjung merupakan Ibukota Kabupaten dimana pusat pemerintahan berputar didaerah ini. Disamping sektor lainnya seperti sektor perkebunan dan usaha kemasyarakatan yang terus berkembang yang menjadikan daerah yang mempunyai potensi yang besar bagi Bank Nagari dalam pengembangan usahanya.

#### **3.1.2. Visi dan Misi Bank Nagari**

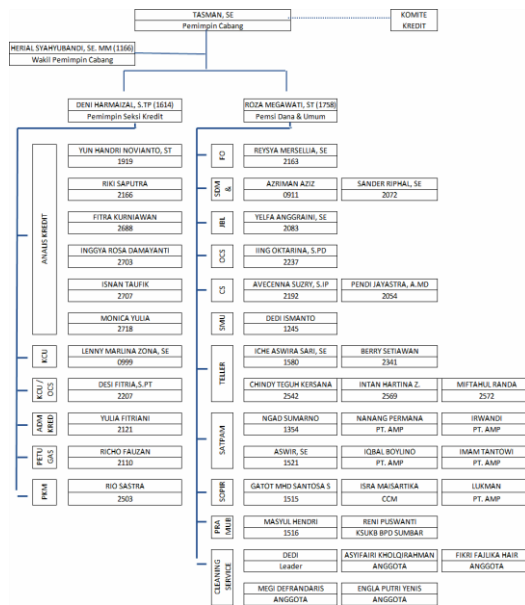
Bank nagari memiliki visi menjadi Bank Pembangunan Daerah terkemuka dan terpercaya di Indonesia artinya :

Menjadi Bank Pembangunan Daerah yang terkemuka dalam arti dikenal dan menonjol di Indonesia, Terpercaya memberi arti bahwa bank sudah menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, memberikan layanan yang memuaskan dan kepatuhan terhadap peraturan dengan kejujuran.

Kantor cabang Bank Nagari memiliki misi sebagai berikut :

Menjalankan operasional baik secara sehat, efektif dan efisien diwilayah kerja kantor cabang sesuai dengan misi bank. Menjalankan peran bank sebagai agen pembangunan di wilayah kerja kantor cabang. Memberikan kontribusi laba terhadap laba bank secara keseluruhan.

### 3.1.3. Struktur Organisasi Bank Nagari Cabang Pulau Punjung



Gambar 1. Struktur organisasi Bank Nagari Cabang Pulau Punjung

Bank Nagari Cabang Pulau Punjung dipimpin oleh seorang pemimpin dengan dibantu oleh satu orang wakil pemimpin cabang yang bertugas mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi secara langsung unit kerja yang ada di bawahnya. Bank Nagari Cabang Pulau Punjung memiliki 2 (dua) unit kerja yaitu seksi kredit dan seksi umum dan Dana

### 3.1.4. Sumberdaya Manusia di Bank Nagari Cabang Pulau Punjung

Bank Nagari Cabang Pulau Punjung sampai bulan April berjumlah 39 orang. Dari keseluruhan karyawan Bank Nagari Cabang Pulau Punjung terdiri dari pejabat, pejabat sementara, karyawan tetap dan karyawan tidak tetap, calon pegawai dan karyawan *training* serta pegawai *outsourcing*.

Sistem penggajian karyawan dilakukan berdasarkan *grade* jabatan yang didasarkan oleh tingkat pendidikan terkecuali untuk pegawai *outsourcing*. Untuk pegawai *outsourcing*, penggajian

dilakukan berdasarkan kontrak kerja dengan dengan kantor cabang yang bersangkutan.

Dari segi tingkat pendidikan dan lama bekerja dapat diketahui bahwa kinerja karyawan sangat berbeda, hal ini disebabkan karena latar belakang pendidikan dapat mempengaruhi pola pikir karyawan. Misalnya karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan SLTA akan berbeda pola pikirnya dengan karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan S1 ataupun S2. Begitu juga dengan lama karyawan tersebut bekerja pada Bank Nagari Cabang Pulau Punjung akan memiliki pengetahuan atau keterampilan yang berbeda. Misalnya karyawan tersebut telah bekerja selama 5 tahun, maka pengetahuan yang dimilikinya lebih besar dari pada karyawan yang bekerja selama 2 tahun. Jadi latar belakang pendidikan dan lama bekerja sangat mempengaruhi kinerja karyawan Bank Nagari Cabang Pulau Punjung.

### 3.1.5. Deskripsi kegiatan bisnis perusahaan

#### 3.1.5.1. Deskripsi jasa

Tujuan Pendirian Bank Nagari adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, sehingga jasa yang ditawarkan oleh Bank Nagari guna mencapai tujuan tersebut adalah menghimpun dana, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang, membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya atas instrumen surat berharga, memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah, menempatkan dan atau meminjamkan dana kepada bank lain, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak

ketiga, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak, melakukan kegiatan anjak piutang, penyertaan modal, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh lembaga perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3.1.5.2. Deskripsi produk

Produk yang ditawarkan oleh Bank Nagari adalah :

1. Penghimpunan Dana meliputi Giro dalam ribu rupiah, Tabungan dan Deposito.
2. Pemberian Kredit meliputi:
  - a. Kredit Produktif yaitu Kredit Investasi dan kredit Modal kerja, diantaranya :
    - Kredit Modal Kerja Kontraktor (KMKK).
    - Kredit Rekening Koran (KRK).
    - Kredit Modal Kerja Multi Guna (KMK-MG).
    - Kredit Investasi Multi Guna (KI-MG).
    - Kredit Kepada Koperasi (KK-Koperasi).
    - Kredit Kepada BPR (KK-BPR).
    - Kredit KUMK-SUP 005.
    - Kredit Usaha Rakyat (KUR).
  - b. Kredit Konsumtif, diantaranya :
    - Kredit Cicilan Uang.
    - Kredit Cicilan Uang Pensiun.
    - KCU-Haji.
    - KCU-Komputer.
    - KCU-Kendaraan.
    - KPR-MULTI GUNA (KPR-MG).
    - Kredit Jaminan Deposito (KJD)
3. Jasa Perbankan Lainnya (JBL)
  - Transfer (iriman uang)
  - Inkaso (*Collection*)
  - Kartu ATM
  - Layanan pembayaran seperti gaji, pensiun, honorarium, penerimaan

uang kuliah dan pendaftaran mahasiswa baru

- Kliring (*Clearing*)
- *Safe Deposit Box*
- Pembelian voucher isi ulang pulsa GSM/CDMA
- Layanan pembayaran tagihan listrik, air, *telepone*, dan lain-lain
- Pembayaran tagihan pasca bayar Kartu Halo
- Menerima setoran PBB dan restribusi
- Melaksanakan pembayaran gaji atau pensiunan pegawai daerah

### 3.1.5.3. Deskripsi pelanggan

Pelanggan/ nasabah Bank Nagari Cabang Pulau Punjung secara garis besar terdiri dari dua bagian, yaitu nasabah yang merupakan pegawai dan yang bukan pegawai. Nasabah yang dikatakan bukan pegawai adalah nasabah yang berasal dari masyarakat umum yang memiliki usaha sendiri yang menikmati produk dari kredit komersial. Berbeda dengan nasabah yang merupakan pegawai, baik itu pegawai pemerintah, pegawai swasta dan pegawai bank itu sendiri. Untuk nasabah yang merupakan pegawai diberikan produk kredit yang berupa kredit personal atau biasa dikenal dengan kredit cicilan umum (KCU). Khusus untuk kredit personal, tidak dipungut biaya administrasi dan biaya provisi ringan dibandingkan provisi kredit komersial untuk pelanggan bukan pegawai.

### 3.1.5.4. Deskripsi kegiatan pemasaran

Kegiatan pemasaran Bank Nagari Cabang Pulau Punjung dilakukan setiap hari dari hari Senin sampai Jum'at di kantor cabang yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Km 2 Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Wilayah pemasaran Bank Nagari Cabang Pulau Punjung mencakup beberapa kecamatan yang ada di Dharmasraya yaitu Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan

Sitiung, Kecamatan Timpeh , Kecamatan Koto Baru dan Kecamatan IX Koto.

### **3.1.5.5. Deskripsi kegiatan pemasok**

Dalam menjalankan kegiatan operasional, Bank Nagari Cabang Pulau Punjung memerlukan peralatan dan perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Peralatan dan perlengkapan kantor Bank Nagari Cabang Pulau Punjung biasa disebut dengan Alat Tulis Kantor (ATK). Untuk memenuhi kebutuhan ATK, seluruh Bank Nagari bekerjasama dengan koperasi Bank Nagari itu sendiri yang terletak di wilayah kantor pusat, yaitu di Padang Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan pemasok kegiatan non operasional Bank Nagari Cabang Pulau Punjung merupakan pemasok modal dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sendiri dan dari masyarakat sekitar Pulau Punjung, Dharmasraya yang menggunakan jasa simpanan.

### **3.1.6. Kondisi keuangan Bank Nagari Cabang Pulau Punjung**

Kondisi keuangan Bank Nagari Cabang Pulau Punjung dapat dilihat dari laporan laba/rugi dan neraca periode 28 April 2017 Bank Nagari Cabang Pulau Punjung memperoleh laba bersih yang bernilai positif yaitu sebesar Rp. 4.224.470.058,11. Hal tersebut menggambarkan hasil kegiatan bank dalam waktu tersebut memperoleh keuntungan. Selain laporan laba rugi bank nagari cabang pulau punjung juga membuat neraca pada periode 28 April 2017 yang mana pada neraca asset yang diperoleh yaitu sebesar Rp. 404.381.283.745,86.

## **3.2. Analisis topik**

### **3.2.1. Identifikasi KUR pada Bank Nagari Cabang Pulau Punjung**

Jenis KUR yang disalurkan oleh Bank Nagari Cabang Pulau Punjung

terdiri dari KUR Mikro dan KUR Ritel KUR sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015, yaitu :

#### **1.2.1.1. Penyaluran KUR Mikro**

- a) KUR Mikro jumlah paling banyak sebesar Rp. 25.000.000
- b) Suku bunga KUR Mikro sebesar 9% efektif per tahun.
- c) Jumlah produk KUR Mikro yang terealisasi pada Bank Nagari Cabang Pulau Punjung adalah sebesar 89,71% dengan jumlah nasabah yaitu 68 orang per April 2017
- d) Jangka waktu KUR Mikro paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi. (jangka waktu untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan investasi mengacu pada peraturan perundang-undangan)
- e) Calon penerima KUR Mikro adalah individu/perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif mikro, kecil dan menengah sektor pertanian.
- f) Calon penerima KUR harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan.

#### **1.2.1.2. Penyaluran KUR Ritel**

- a) KUR Ritel >Rp. 25.000.000 dan paling banyak sebesar Rp. 500.000.000
- b) Suku bunga KUR Ritel sebesar 9% efektif per tahun.
- c) KUR ritel yang terealisasi pada Bank Nagari Cabang Pulau Punjung sebesar 10,29% dengan jumlah nasabah yaitu 48 orang per April 2017
- d) Jangka waktu KUR Ritel paling lama 4 tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.
- e) Calon penerima KUR Ritel adalah individu/perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif mikro, kecil dan menengah sektor pertanian yaitu

seluruh usaha di tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan dan peternakan.

f) Calon penerima KUR Ritel harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan.

Usaha yang dibiayai Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Nagari Cabang Pulau Punjung diutamakan untuk pencapaian target-target utama program Kementerian Pertanian, dari aspek pemenuhan permodalan guna mendorong pengembangan usaha. Usaha sektor pertanian sering disebut usaha agribisnis yang terdiri atas :

- 1) Sub sistem hulu
- 2) Sub sistem pertanian primer (budidaya)
- 3) Sub sistem hilir
- 4) Sub sistem penunjang

Penetapan bidang usaha yang dibiayai KUR sektor pertanian dibedakan atas (1) usaha pertanian prioritas untuk mendukung swasembada dan swasembada berkelanjutan, dan (2) usaha pertanian mendukung peningkatan kesejahteraan petani.

Adapun kegiatan usaha produktif di sektor pertanian dari hulu, budidaya, dan hilir yang dibiayai melalui KUR pada Bank Nagari Cabang Pulau Punjung, yaitu

1. Usaha budidaya (*onfarm*)
  - a. Tanaman pangan : sereal, umbi-umbian
  - b. Hortikultura : buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat
  - c. Perkebunan : tanaman tahunan dan penyegar, tanaman semusim dan rempah
  - d. Peternakan : ruminasia dan non ruminasia.
2. Usaha hulu
  - a. Pengadaan/perdagangan sarana produksi : pupuk, pengadaan benih, dan lain-lain.
  - b. Pengadaan alsintan pra panen : traktor, mesin pembibitan (*seedler*), alat tanam biji-bijian (*seeder*) dan lain-lain.
3. Usaha hilir

a. Pengadaan/pemasaran hasil produksi: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

b. Pengadaan alsintan tanaman pangan.

c. Pengadaan alsintan hortikultura, antara lain : pengolah bawang goreng, pengolah keripik buah (*vacuum frying*), pengolah selai/dodol, pengolah juice buah-buahan, mesin sortasi buah.

d. Pengadaan alsintan perkebunan, antara lain : lantai jemur, sangrai kopi, sangrai kakao, pengolah the, pengolah lada, pengolah kelapa, keprasa tebu, mesin tebang tebu/cane, harvester, grab loader, mesin pengolah biji jarak.

e. Pengadaan alsintan peternakan, antara lain : paket inseminasi buatan, mesin tetas, pencacah daging, pemerah susu, pasteurisasi susu, mesin pellet.

f. Usaha budidaya, pengelolaan hasil dan pengadaan/pembiayaan alsintan.

### **3.2.3. Prosedur Penyaluran KUR Mikro dan Ritel pada Bank Nagari cabang Pulau Punjung**

#### **3.2.3.1. Kriteria calon debitur KUR**

Kriteria calon debitur yang akan menerima KUR dari Bank Nagari Cabang Pulau Punjung adalah sebagai berikut :

- Warga Negara Indonesia yang cakap melakukan perbuatan hukum (berusia minimal 21 tahun atau telah menikah, berakal sehat dan tidak berada dalam pengampunan/*curatele*).
- Termasuk kepada salah satu kriteria penerima KUR
- Mempunyai usaha produktif pada sektor yang diperkenankan diberikan KUR
- Termasuk kepada kriteria UMKM
- Calon debitur KUR harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan.
- Data calon debitur harus terdapat dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
- Calon Debitur/Kelompok Debitur tidak mempunyai kredit pembiayaan dengan kualitas Non-Lancar di Bank,



Bank Lain dan/atau Lembaga Keuangan Lain

- Calon debitur, dapat sedang menerima kredit pembiayaan lainnya antara lain berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit, serta KUR dengan kolektibilitas lancar.
- Calon debitur memiliki dokumen keterangan usaha
- Calon Debitur mempunyai rekening tabungan di Kantor Cabang Pulau Punjung
- Domisili dan lokasi pembiayaan/proyek calon debitur tidak sulit untuk dilakukan supervisi

### 3.2.3.2. Dokumen persyaratan KUR

- Aplikasi permohonan kredit
- Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP atas nama calon debitur.
- Copy KTP/SIM/Paspor istri/suami calon debitur penjamin dan pemilik agunan.
- Copy Surat Nikah, bagi yang telah menikah, dengan memperlihatkan bukti dokumen aslinya.
- Copy Kartu Keluarga
- Pas photo calon debitur dan suami/istri ukuran 4 x 6 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar
- Photo usaha minimum 2 (dua) lembar.
- Perizinan usaha atau Surat Keterangan Usaha 1). Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (SIUMK) dari pemerintah daerah setempat, atau; 2). Surat Keterangan Usaha dari dinas/instansi/pengelola pasar (jika usaha berada di lingkungan pasar-pasar), atau; 3). Surat Keterangan Wali Nagari/Kepala Desa/Lurah.
- Khusus bagi calon debitur yang berasal dari pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja, menyerahkan copy sertifikat piagam/surat keterangan sebagai bukti bahwa Calon Debitur telah pernah mengikuti pelatihan kewirausahaan atau materi yang sejenis dengan kewirausahaan.

- Copy bukti kepemilikan agunan
- Surat keterangan hubungan keluarga dari instansi yang berwenang apabila agunan bukan atas nama debitur atau istri/suami debitur.
- Bukti print out SID Bank Indonesia
- Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening dari Bank, apabila calon debitur masih memiliki baki debit
- Kredit pembiayaan produktif (program dan non-program) yang tercatat pada SID Bank Indonesia (SID BI) tetapi yang bersangkutan sudah melunasi kredit pembiayaan tersebut.
- Copy buku tabungan atau print out master rekening tabungan milik debitur.

### 3.2.3.3. Agunan KUR

Jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Nagari menetapkan ijin usaha yang dijalankan menjadi jaminan atau agunan pokok. Apabila agunan pokok dapat diberikan nilai sesuai ketentuan agunan yang berlaku, maka debitur tidak diwajibkan menyediakan agunan tambahan, dan apabila agunan pokok tidak dapat diberikan nilai sesuai ketentuan agunan yang berlaku sehingga nilainya adalah PM/ Nihil, maka debitur wajib menyediakan agunan tambahan, sebagai contoh adalah agunan berupa barang seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, tanaman kebun/sawah, agunan berupa surat berharga seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, dan lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Plafond diatas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta, debitur wajib menyerahkan agunan, dengan nilai likuidasi agunan

- tambahan minimal 30,00% kecil dari 100% dibandingkan plafond
2. Plafond diatas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta, debitur wajib menyerahkan agunan, dengan nilai likuidasi agunan tambahan minimal 40,00% kecil dari 100% dibandingkan plafond
  3. Plafond diatas Rp 100 juta s/d Rp 250 juta, debitur wajib menyerahkan agunan, dengan nilai likuidasi agunan tambahan minimal 50,00% kecil dari 100% dibandingkan plafond
  4. Plafond diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta, debitur wajib menyerahkan agunan, dengan nilai likuidasi agunan tambahan minimal 60,00% kecil dari 100% dibandingkan plafond

#### **3.2.3.4. Prosedur Penyaluran KUR**

- 1) Nasabah mendatangi Bank Nagari Cabang Pulau Punjung
- 2) Nasabah datang dengan membawa persyaratan
- 3) Wawancara langsung dengan debitur. Setelah semua berkas persyaratan kredit diterima, pihak bank melakukan wawancara langsung dengan debitur.
- 4) Analisis kredit, kemudian akan dilakukan tahap analisis kredit atau tahap pemeriksaan yang diperiksa oleh Petugas Kredit Mikro.
- 5) Penggunaan SID, penggunaan SID (Sistem Informasi Debitur) oleh Bank Indonesia (BI *Checking*), dimaksud disini adalah sebagai pemeriksaan apakah debitur terbebas dari daftar kredit yang sedang bermasalah.
- 6) Peninjauan langsung ke lapangan (*on the spot*). Setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak Bank Nagari Cabang Pulau Punjung dalam hal ini Petugas Kredit Mikro akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan (*on the spot*)
- 7) Rapat Petugas Kredit Mikro dan Pemimpin Seksi Kredit. Hasil survey dirapatkan oleh Petugas Kredit Mikro dan Pemimpin Seksi Kredit .
- 8) Tahap pemberian putusan kredit, calon debitur akan memperoleh keputusan

kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat sesuai permohonan yang diajukannya.

- 9) Tahap pencairan kredit/akad kredit. meliputi beberapa tahap yaitu tahap persiapan pencairan, penandatanganan perjanjian pencairan kredit.

Berdasarkan penerapan prosedur penyaluran KUR pada Bank Nagari Cabang Pulau Punjung dapat diketahui bahwa prosedur penyaluran KUR yang diterapkan oleh Bank Nagari Cabang Pulau Punjung sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator nomor 13 tahun 2015 Bidang Perekonomian, dimulai dari permohonan oleh calon debitur, penilaian kredit, tahap putusan kredit, tahap perjanjian kredit, hingga tahap realisasi kredit

#### **3.3. Permasalahan yang terjadi pada prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Nagari Cabang Pulau Punjung**

1. Identitas diri pemohon kredit. Yang menjadi kendala pada persyaratan yang berkaitan dengan identitas Pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini antara lain tentang kepastian nama pemohon kredit.
2. Surat Izin Usaha  
Apabila belum ada dilakukan ijin usaha dengan Surat Keterangan Kepala Desa (SKKD) yang dikuatkan oleh Camat maka tidak memberikan kepastian tentang jenis usaha yang tetap, padahal ini akan menjadi penilaian pihak bank tentang kemampuan pemohon untuk pengembalian kreditnya
3. Jaminan tambahan  
Yang menjadi kendala dalam hal ini adalah tidak jarang barang jaminan tersebut bukan atas nama pemohon sendiri, atau tanah yang belum dibagi waris, sehingga

- kepastian hukumnya juga masih sulit diperoleh.
3. Sikap pemohon kredit  
Tingkah laku dan kemampuan pemohon sebagai pengusaha, yang pada umumnya tidak nampak saat pengajuan permohonan kredit, sehingga banyak kredit macet karena ketidak cermatan pihak Bank Nagari dalam memperhatikan hal ini.
  4. Hubungan pemohon kredit dengan bank lain  
Hubungan pemohon kredit dengan bank lain, utamanya dalam perkreditan, juga sulit diketahui, karena sering terjadi pemohon kredit kepada bank lain dengan nama lain atau dengan atas nama keluarga lain.

#### IV. KESIMPULAN

1. Jenis penyaluran KUR yang disalurkan oleh Bank Nagari Cabang Pulau Punjung terdiri dari KUR Mikro dan KUR Ritel KUR sesuai dengan KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu : 1) KUR Mikro diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 2) KUR Ritel diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah diatas Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
2. Adapun prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada Bank Nagari Cabang Pulau Punjung untuk calon debitur adalah sebagai berikut : 1) Nasabah mendatangi Bank Nagari Cabang Pulau Punjung, 2) Nasabah datang dengan membawa persyaratan, 3)

Wawancara langsung dengan debitur, 4) Analisis kredit, 5) Penggunaan SID (Sistem Informasi Debitur), 6) Peninjauan langsung ke lapangan (*on the spot*), 7) Rapat Petugas Kredit Mikro dan Pemimpin Seksi Kredit, 8) Tahap pemberian putusan kredit, 9) Tahap pencairan kredit/akad kredit.

3. Permasalahan yang terjadi dalam prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diantaranya terdapat pada 1) Identitas diri Pemohon Kredit, 2) Surat Ijin Usaha, 3) Jaminan tambahan, 4) Sikap pemohon kredit, 5) Hubungan Pemohon kredit dengan Bank lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Buku Ketentuan Wewenang Bank Nagari. 2016
- Moleong, L. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 13 Tahun 2015
- Tim Pelaksana Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM. 2016. *Buku Peraturan KUR*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.
- Website Bank Nagari. 2014. [www.banknagari.co.id/galleryproduk](http://www.banknagari.co.id/galleryproduk). Produk bank nagari, diakses pada 02 Mei 2017